

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Kerja SKPD, merupakan bentuk pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana kerja (Renja) Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menjabarkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Renja-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Hal tersebut merupakan pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, Kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, politik dan keamanan.

Untuk mencapai hal tersebut proses pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasilnya. Dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting karena di dalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Dengan kata lain perencanaan pembangunan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik yang dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
18. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Rencana kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang sesuai dengan kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mencapai visi **“HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTAL UNGGUL”** dalam kurun waktu Tahun 2016-2021, yang dijabarkan melalui 5 (lima) misi agenda pembangunan daerah tahun 2016-2021, yakni :

- (a) Meningkatkan Iman dan Takwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
- (c) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
- (d) Meningkatkan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Kerakyatan; dan
- (e) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 yaitu :

1. Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ke dalam rencana kegiatan Pembangunan.
2. Terwujudnya kemandirian, ketentraman, ketertiban, keamanan dan kenyamanan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis,serta kehidupan yang lebih sejahtera.
3. Pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan oleh SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2017 melaksanakan 1 (satu) urusan, 11(sebelas) Program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

URUSAN	PROGRAM		KEGIATAN	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			3	Penyediaan Alat Tulis Kantor
			4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			6	Penyediaan makanan dan minuman
			7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
			8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
			9	Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang-undangan
			10	Penyediaan Jasa Perbendaharaan dan Pelaporan-Pelaporan Kegiatan
			11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
			13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	3	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	16	Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun
			17	Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK
			18	Pembinaan dan Pengawasan Aset Dana Bergulir hasil PNPM MPd
	4	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	19	Fasilitasi Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan
			20	Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
	5	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	21	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
	6	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	22	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
	7	Program Pengembangan Adat dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	23	Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK
			24	Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan

	8	Program Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	25	Demplot Pengolahan Buah Aren menjadi Kolang Kaling
			26	Demplot Penyulingan minyak nilam dengan Teknologi Tepat Guna bagi petani Nilam
			27	Mengikuti Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Prov. Sumatera Utara dan Nasional
	9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	28	Operasional Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Anak (P2TP2A)
			29	Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan
			30	Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak cacat
			31	Rakor PPRG Penganggaran Yang Responsif Gender
	10	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	32	Perayaan Hari Kartini
			33	Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak
			34	Pencegahan dan Penanggulangan KDRT
	11	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintahan Desa	35	Penyusunan Peraturan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			36	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan (Tahun 2018)
Kabupaten Humbang Hasundutan

SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun ... (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d 2018 (Tahun Berjalan)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Usuran Wajib										
	Usuran Wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak										
	I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya administrasi perkantoran yang efisien dan efektif dalam mendukung aktivitas organisasi									
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00 %	
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00 %	
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00 %	
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00 %	
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya penerangan bangunan kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00 %	
	6 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum aparatur	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00 %	
	7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00 %	
	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00 %	
	9 Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang - undangan	Terciptanya aparatur yg berwawasan luas dan berkualitas	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	50,00 %	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun ... (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d 2018 (Tahun Berjalan)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
10	Penyediaan Jasa Perbendaharaan dan Pelaporan-Pelaporan Kegiatan	Terciptanya administrasi keuangan yang akuntabel	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	50,00 %	
11	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	60 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40,00%	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3 paket	50,00 %	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan gedung kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	50,00 %	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	50,00 %	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya bahan dan jasa pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	50,00 %	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur negara									
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur negara	230 orang	-	0 orang	0 orang		0 orang	0 orang	0,00%	
IV	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa									
1	Penyusunan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun	30 dokumen	-	5 dokumen	5 dokumen		7 dokumen	13 dokumen	43,33%	
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Produk Hukum di Desa	153 Desa	-	0 Desa	0 Desa		0 Desa	0 Desa	0,00%	
3	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	153 Desa	-	10 Desa	10 Desa	100 %	30 Desa	40 Desa	26,14 %	
4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak	153 Desa	-	0 Desa	0 Desa		28 Desa	28 Desa	18,30%	
V	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam manajemen pemerintahan desa									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun ... (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d 2018 (Tahun Berjalan)		Catatan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12	
	1	Bimbingan teknis Kepala Desa baru terpilih	Jumlah peserta yang dilatih	153 Desa	-	0 orang	0 orang		0 orang	0 orang	0,00%	
	2	Bimtek Penyusunan Laporan Kepala Desa	Jumlah peserta yang dilatih	153 Desa	-	0 Desa	0 Desa		0 Desa	0 Desa	0,00%	
	3	Lomba Desa terbaik tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Sumatera Utara	Terpilihnya juara lomba desa	50 Desa	-	0 Desa	0 Desa		0 Desa	0 Desa	0,00%	
	VI	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel									
	1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	Jumlah rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang dievaluasi	765 dokumen	153 dokumen	153 dokumen	153 dokumen	100%	153 dokumen	459 dokumen	60,00%	
	2	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	5 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	50,00%	
	3	Implementasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) yang diimplementasikan pada Pemerintah Desa	5 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	2 Aplikasi	40,00%	
	VII	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat									
	1	Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa yang terbentuk	153 BUM Desa	35 BUM Desa	30 BUM Desa	35 BUM Desa	116,66 %	50 BUM Desa	85 BUM Desa	55,55 %	
	2	Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengurus badan usaha milik desa	Jumlah peserta yang dilatih	765 orang	-	0 orang	0 orang		0 orang	0 orang	0,00%	
	3	Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	6 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	50,00 %	
	VIII	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi	Berperannya lembaga kemasyarakatan dan kader									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun ... (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d 2018 (Tahun Berjalan)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	Masyarakat	pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan									
	1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Jumlah Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dilatih	30 orang	-	0 orang	0 orang		0 orang	0 orang	0,00%
	2	Fasilitasi Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kel	Tersedianya data profil desa/kel yang aktual dan terbaru	154 desa/kel	88 desa/kel	0 desa/kel	0 desa/kel	0%	0 desa/kel	88 desa/kel	1 desa/kel
	3	Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	Terlaksananya pembinaan/monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	6 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	1 tahun	3 tahun	50,00 %
	4	Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	6 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	50,00 %
	IX	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mampu menciptakan suasana tenram dan damai dalam kehidupan sosial budaya masyarakat								
	1	Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa yang dibina	154 desa/kel	30 desa/kel	30 desa/kel	30 desa/kel	100%	15 desa/kel	75 desa/kel	48,70 %
	2	Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	Terlaksananya kegiatan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	154 desa/kel	30 desa/kel	30 desa/kel	30 desa/kel	100%	15 desa/kel	75 desa/kel	48,70 %
	X	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Terbangunnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat melalui penggunaan								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun ... (tahun n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017 (Tahun Lalu)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s.d 2018 (Tahun Berjalan)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
		teknologi tepat guna									
	1	Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan	4 tahun	-	0 tahun	0 tahun		0 tahun	0 tahun	0,00%	
	2	Jombore TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	25 jenis	-	2 jenis	2 jenis	100%	3 jenis	7 jenis	16,00%	
	XI	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak									
	1	Penyusunan produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	10 dokumen	-	0 dokumen	0 dokumen		0 dokumen	0 dokumen	0,00%	
	2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	60,00%	
	3	Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	60,00%	
	4	Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak cacat	5 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	2 kegiatan	40,00%	
	5	Rakor PPRG Penganggaran Yang Responsif Gender	5 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	3 kegiatan	60,00%	
	XII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan									
	1	Perayaan Hari Kartini	5 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	1 kegiatan	2 kegiatan	40,00%	
	2	Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak	3000 orang	-	500 orang	500 orang	100%	250 orang	750 orang	25,00 %	
	3	Pencegahan dan Penanggulangan KDRT	4000 orang	-	750 orang	750 orang	100 %	250 orang	1000 orang	25,00 %	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Arsip pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan pelaksana Urusan Wajib Kearsipan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan. Kondisi penyelenggaraan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan dapat ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :

1. Mekanisme Kelembagaan

Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

2. Mekanisme Pelaksanaan

Seiring diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kemudian 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mekanisme pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif (*Participatory planning*), bahwa perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting untuk mendukung pendidikan seumur hidup (*long life education*) menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan dan pembangunan kearsipan modern yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sekaligus dikondisikan untuk menjawab agenda pembangunan nasional yang berkaitan dengan kearsipan.

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan

pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui rapat koordinasi baik di tingkat Pusat, Propinsi, dan kabupaten/kota.

3. Hasil Kerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan, antara lain:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah terkait urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan;
- b. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021;
- c. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017;
- d. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- e. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017;
- f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2017;
- g. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2018;
- h. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perbaikan mutu pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan, mulai dari menampung aspirasi dan kebutuhan pengguna/pengunjung hingga menuangkan dalam perencanaan program dan kegiatan rencana kerja;
- i. Evaluasi dan rewiu pelaksanaan perencanaan baik perencanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan jangka menengah maupun tahunan melalui Rapat kerja dan rapat koordinasi dengan Pusat, Propinsi, dan Kota/Kabupaten untuk penyusunan rencana kerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan dengan realisasi pelaksanaannya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam table sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
1	Jumlah desa yang diperbaharui Profil desanya (desa/kel)			-	154	154		-		154	154	
2	Jumlah Musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan yang dapat difasilitasi (desa/kel)			-	40	40	40	-	40		40	40
3	Terlaksananya bulan bhakti gotong royong masyarakat (kegiatan)			1	1	1	1	1	1		1	1
4	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat yang dilatih (orang)			-	153	153	153	-	153		153	153
5	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG (desa)			15	20	25	25	15	20		25	25
II	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)			30,80	35,00	40,00	45,00	30,80	35,00		40,00	45,00
2	Partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)			6,15	10,00	6,15	6,15	6,15	10,00		6,15	6,15
3	Ratio KDRT			0,09	0,08	0,07	0,06	0,09	0,08		0,07	0,06
4	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)			75,00	80,00	85,00	90,00	75,00	80,00		85,00	90,00

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan SKPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan SKPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra SKPD.

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi :

a. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

- 1). Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai tukar petani maupun upah penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan.
- 2). Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai. Keterbatasan dan penyediaan sarana prasarana dan tenaga pendidikan dan kesehatan yang belum memadai, ketersediaan lingkungan permukiman perdesaan seperti air bersih, perumahan, sanitasi dan drainase juga masih belum memadai, akses terhadap listrik, transportasi dan telekomunikasi juga masih rendah terutama di desa-desa perbatasan, terpencil dan kepulauan.
- 3). Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi, disebabkan antara lain karena tingkat kemandirian masyarakat masih rendah.
- 4). Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.
- 5). Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.
- 6). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa semakin dituntut untuk semakin efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat desanya serta mampu menjalankan kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundangan. Namun demikian, kondisi desa yang sangat beragam dan juga kapasitas sumber daya manusia pemerintahan desa dan kelembagaan masyarakat desa dalam tata kelola pemerintahan Desa masih sangat bervariasi dan pada umumnya dinilai masih rendah. Dengan adanya UU Desa, kualitas tata kelola Pemerintah Desa menjadi penting, mengingat bahwa Pemerintah Desa harus dapat membuat perencanaan Desa dan mengelola keuangan Desa secara mandiri dan akuntabel. Kualitas sumber daya manusia turut dipengaruhi oleh motivasi dan tingkat pendidikan kepala desa dan perangkatnya. Dalam beberapa kasus, sumber daya manusia yang kompeten lebih memilih untuk merantau dan mencari penghidupan yang lebih baik di luar desanya daripada tinggal dan membangun desanya.
- 7). Dalam rangka penataan dan pemantapan sistem pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, pemerintah perlu menempuh kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa serta fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dalam mendukung proses pengelolaan pembangunan partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 8). Permasalahan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di SKPD
 - a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
 - b. Belum maksimalnya pengembangan SDM aparatur;
 - c. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; dan
 - d. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan masyarakat dan desa.

b. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- 1). Kekerasan terhadap Perempuan
Permasalahan yang dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.

2). Tenaga Kerja Perempuan

Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak terorganisir, jaminan kesehatan akibat kerja adalah menjadi tanggungan pribadi tenaga kerja perempuan. Sedangkan yang bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, kesempatan karir, dan lain-lain.

3). Politik dan Pengambilan Keputusan

Keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, maupun peran dan partisipasi perempuan dalam politik belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya

4). Ekonomi

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih rendah dari laki-laki, sehingga menyebabkan produktivitas ekonomi perempuan belum optimal. Ada dua hal yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah.

5). Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan antara lain terlihat dari: a) belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai prioritas pembangunan; b) belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam siklus pembangunan; dan c) masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

6). Permasalahan Pembangunan Perlindungan Anak

a. Perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.

b. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum ditangani dengan baik, pengetahuan yang terbatas dari keluarga/orangtua yang memiliki ABK menyebabkan keluarga/orangtua malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu, jumlah guru di sekolah-sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas sehingga banyak yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum.

c. Permasalahan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDS, perkawinan usia dini. Masalah sosial yang dialami anak pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik.

d. Pada anak yang berhadapan dengan hukum, di seluruh institusi atau tingkat peradilan, aparat penegak hukum memperlakukan anak seperti orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum banyak diproses tanpa didampingi oleh pengacara;

e. Belum semua program dan kegiatan pembangunan baik di pusat dan daerah selaras dengan mandat Konvensi Hak Anak (KHA), masih bersifat parsial, belum holistik dan terintegratif. Hal ini terlihat dari: 1) meningkatnya prevalensi kekerasan pada anak; 2) masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan/ kebijakan terkait

- perlindungan anak dan belum lengkapnya aturan pelaksanaan suatu undang-undang; serta 3) masih kurangnya kapasitas lembaga perlindungan anak dalam mengimplementasikan berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang ada.
- f. Masih tingginya angka usia pernikahan anak, terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak, dan masih banyaknya anak terlantar tanpa adanya pengasuhan orang tua atau orang tua pengganti, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua dalam memberikan pengasuhan berkualitas kepada anaknya melalui pemenuhan hak anak dengan kasih sayang tanpa kekerasan.
 - g. Belum optimalnya kualitas pendidikan baik dilihat dari sisi pendidik dan tenaga kependidikan, masih tingginya kekerasan terhadap anak di sekolah, masih sedikitnya sekolah yang menuju Sekolah Ramah Anak (SRA), belum tersedianya Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), terbatasnya ruang kreativitas anak di luar sekolah, terbatasnya ruang bermain ramah anak, serta masih rendahnya pemahaman/pengetahuan orang tua akan pentingnya pemenuhan hak anak untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya untuk pengembangan diri anak. Demikian pula dengan negara, masyarakat dan dunia usaha belum optimal untuk mewujudkan hak anak untuk memanfaatkan waktu luang, rekreasi dan kegiatan budaya secara optimal.
 - h. Masih sedikitnya jumlah puskesmas yang menginisiasi menuju Puskesmas Ramah Anak (PRA).
 - i. Belum optimalnya peranan pemerintah daerah untuk memfasilitasi partisipasi anak dalam bentuk Forum Anak.
 - j. Pemerintah daerah belum menginisiasi menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
- 7). Permasalahan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di SKPD
- a. Belum optimalnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;
 - b. Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;
 - c. Belum maksimalnya pengembangan SDM aparatur;
 - d. Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;
 - e. Belum maksimalnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; dan
 - f. Belum optimalnya penelaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016-2021, bahwa visi pembangunan daerah adalah **“MEWUJUDKAN HUMBANG HASUNDUTAN YANG HEBAT DAN BERMENTALITAS UNGGUL”**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menjabarkan arahan RPJMD dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu dengan mendukung misi kedua dari 5 (lima) misi utama, yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, dengan fokus pada tujuan Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan Sasaran meningkatkan mutu sumberdaya manusia di segala bidang melalui pendirian sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lain serta penyelenggaraan berbagai jenis kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan penelitian serta perancangan sistem kesehatan yang lengkap dan pendirian sarana dan prasarana kesehatan yang cukup.

C. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Dari hasil telaah analisis gambaran pelayanan SKPD dan renstra K/L, serta permasalahan pelayanan SKPD selanjutnya ditentukan isu-isu strategis pelayanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

a. Isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

- 1). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan berbagai kemajuan, antara lain peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kualitas hidup secara rata-rata. Namun demikian, krisis global yang terjadi beberapa tahun belakangan ini telah menyebabkan tingginya tingkat inflasi dan menurunnya pertumbuhan lapangan kerja sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. Untuk itu dalam rangka penurunan jumlah penduduk miskin yang merupakan target pemerintah, kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prioritas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 2). Implementasi UU tentang Desa dalam rangka penataan dan pemantapan sistem pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa, pemerintah daerah perlu menempuh kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa serta fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dalam mendukung proses pengelolaan pembangunan partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- 3). Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

b. Isu-isu strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Permasalahan perempuan dan anak yang berkembang di masyarakat harus menjadi perhatian semua pihak agar tidak menimbulkan suatu kesenjangan dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karenanya permasalahan ini menjadi isu strategis. Isu-isu strategis terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- 1). Masih banyaknya kelompok perempuan yang marginal dan belum berdaya dari sisi ekonomi dan pendidikan;
- 2). Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- 3). Belum terpenuhinya pemenuhan hak – hak anak sesuai kebutuhannya baik dibidang hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan perlindungan khusus;
- 4). Masih banyaknya tindak kekerasan (eksploitasi dan diskriminasi) terhadap perempuan dan anak;
- 5). Pengarusutamaan gender (PUG) belum dapat terimplementasi secara optimal karena belum adanya pemahaman yang sama tentang gender;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada bagian ini dijelaskan bahwa terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (bottom up planning) yang kemudian

dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan. Disamping itu usulan program/kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan Musrenbang Tingkat Kabupaten setelah melalui pembahasan di Forum SKPD.

Usulan program/kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan diprioritaskan pada program sebagai berikut :

- 1). Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 3). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 4). Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 5). Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- 6). Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- 7). Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- 8). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 9). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Program dan Kegiatan yang diusulkan pada rancangan awal Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak didasarkan pada analisis kebutuhan. Untuk lebih rincinya kami sajikan pada tabel berikut:

Tabel . 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Humbang Hasundutan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dinas PMDP2A	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	Dinas PMDP2A	12 bulan	45000000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas PMDP2A	Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telepon	12 bulan	45000000	
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	Dinas PMDP2A	12 bulan	12000000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas PMDP2A	Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	12 bulan	12000000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK	Dinas PMDP2A	12 bulan	75000000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas PMDP2A	Terpenuhinya kebutuhan ATK	12 bulan	75000000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Dinas PMDP2A	12 bulan	35000000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas PMDP2A	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	35000000	
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercapainya penerangan bangunan kantor	Dinas PMDP2A	12 bulan	5000000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas PMDP2A	Tercapainya penerangan bangunan kantor	12 bulan	5000000	
6	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum aparatur	Dinas PMDP2A	12 bulan	122000000	Penyediaan makanan dan minuman	Dinas PMDP2A	Terpenuhinya kebutuhan makan minum aparatur	12 bulan	122000000	
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas PMDP2A	12 bulan	300000000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dinas PMDP2A	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	300000000	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Dinas PMDP2A	12 bulan	100000000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Dinas PMDP2A	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	12 bulan	100000000	
9	Penyediaan Bahan Bacaan,	Terciptanya aparatur yg	Dinas	12 bulan	33000000	Penyediaan Bahan Bacaan,	Dinas	Terciptanya aparatur yg	12 bulan	33000000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Peraturan dan Perundang-undangan	berwawasan luas dan berkualitas	PMDP2A			Peraturan dan Perundang-undangan	PMDP2A	berwawasan luas dan berkualitas			
10	Penyediaan Jasa Perbendaharaan dan Pelaporan-Pelaporan Kegiatan	Terciptanya administrasi keuangan yang akuntabel	Dinas PMDP2A	12 bulan	15000000	Penyediaan Jasa Perbendaharaan dan Pelaporan-Pelaporan Kegiatan	Dinas PMDP2A	Terciptanya administrasi keuangan yang akuntabel	12 bulan	15000000	
11	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Teselenggaranya jasa Non ASN	Dinas PMDP2A	12 Bulan	21600000	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Dinas PMDP2A	Teselenggaranya jasa Non ASN	12 Bulan	21600000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas PMDP2A				
12	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Dinas PMDP2A	12 bulan	72000000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PMDP2A	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	72000000	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	Dinas PMDP2A	12 bulan	25000000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas PMDP2A	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	12 bulan	25000000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Dinas PMDP2A	12 bulan	65000000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas PMDP2A	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 bulan	65000000	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Dinas PMDP2A	12 bulan	20000000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas PMDP2A	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	20000000	
III	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur		Dinas PMDP2A	12 bulan		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	Dinas PMDP2A		12 bulan		
16	Pengiriman ASN mengikuti Diklat, Workshop, Bimtek dan Studi Banding	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Dinas PMDP2A	12 bulan	85000000	Pengiriman ASN mengikuti Diklat, Workshop, Bimtek dan Studi Banding	Dinas PMDP2A	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	12 bulan	85000000	
IV	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Dinas PMDP2A				
17	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas aparatur negara	Dinas PMDP2A	40 orang	18000000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Dinas PMDP2A	Tersedianya pakaian dinas aparatur negara	40 orang	18000000	
V	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinas PMDP2A			Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinas PMDP2A	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
18	Penyusunan Peraturan tentang Penyelenggaraan	Jumlah peraturan tentang penyelenggaraan	Dinas PMDP2A	7 Dokumen	165000000	Penyusunan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	Dinas PMDP2A	Jumlah peraturan tentang penyelenggaraan	7 Dokumen	165000000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemerintahan Desa	pemerintahan desa yang disusun				Desa		pemerintahan desa yang disusun			
19	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Produk Hukum di Desa	Dinas PMDP2A	153 Desa	90000000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dinas PMDP2A	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Produk Hukum di Desa	153 Desa	90000000	
20	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	Dinas PMDP2A	153 Desa	175000000	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dinas PMDP2A	Jumlah desa yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	153 Desa	175000000	
21	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak	Dinas PMDP2A	26 Desa	750000000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak	Dinas PMDP2A	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak	79 Desa	2291000000	
VI	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Dinas PMDP2A				
22	Bimbingan teknis Kepala Desa baru terpilih	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam manajemen pemerintahan desa	Dinas PMDP2A	26 orang	112.500.000	Bimbingan teknis Kepala Desa baru terpilih	Dinas PMDP2A	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam manajemen pemerintahan desa	26 orang	112.500.000	
23	Bimtek Penyusunan Laporan Kepala Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam manajemen pemerintahan desa	Dinas PMDP2A	153 Desa	210.000.000	Bimtek Penyusunan Laporan Kepala Desa	Dinas PMDP2A	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam manajemen pemerintahan desa	153 Desa	210.000.000	
24	Lomba Desa terbaik tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Sumatera Utara	Terpilihnya juara lomba desa	Dinas PMDP2A	10 Desa	155.000.000	Lomba Desa terbaik tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Sumatera Utara	Dinas PMDP2A	Terpilihnya juara lomba desa	10 Desa	155.000.000	
VII	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel				Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dinas PMDP2A	Meningkatnya Kapasitas Aparat dan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Efektif, Transparan dan Akuntabel			
25	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	Jumlah rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang dievaluasi	Dinas PMDP2A	153 Desa	150.000.000	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	Dinas PMDP2A	Jumlah rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang dievaluasi	153 Desa	150.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
26	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Dinas PMDP2A	153 Desa	495.000.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Dinas PMDP2A	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	153 Desa	495.000.000	
27	Implementasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) yang diimplementasikan pada Pemerintah Desa	Dinas PMDP2A	1 Aplikasi	150.000.000	Implementasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa	Dinas PMDP2A	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) yang diimplementasikan pada Pemerintah Desa	1 Aplikasi	150.000.000	
VIII	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terbangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	Dinas PMDP2A			Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Dinas PMDP2A	Terbangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat			
28	Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa yang terbentuk	Dinas PMDP2A	30 BUM Desa	75.000.000	Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Dinas PMDP2A	Jumlah BUM Desa yang terbentuk	30 BUM Desa	75.000.000	
29	Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengurus badan usaha milik desa	Jumlah peserta yang dilatih	Dinas PMDP2A	150 orang	50.000.000	Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengurus badan usaha milik desa	Dinas PMDP2A	Jumlah peserta yang dilatih	150 orang	50.000.000	
30	Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	Dinas PMDP2A	10 unit (kecamatan)	200.000.000	Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	Dinas PMDP2A	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	10 unit (kecamatan)	200.000.000	
IX	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Berperannya lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan	Dinas PMDP2A			Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dinas PMDP2A	Berperannya lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan			
31	Bimbingan Teknis Peningkatan	Jumlah Pengurus Badan	Dinas PMDP2A	30 orang		Bimbingan Teknis Peningkatan	Dinas PMDP2A	Jumlah Pengurus Badan	30 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dilatih			50.000.000	Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)		Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dilatih		50.000.000	
32	Fasilitasi Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kel	Tersedianya data profil desa/kel yang aktual dan terbaru	Dinas PMDP2A	154 desa/kel	200.000.000	Fasilitasi Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kel	Dinas PMDP2A	Tersedianya data profil desa/kel yang aktual dan terbaru	154 desa/kel	200.000.000	
33	Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	Terlaksananya pembinaan/monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	Dinas PMDP2A	1 tahun	105.000.000	Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	Dinas PMDP2A	Terlaksananya pembinaan/monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	1 tahun	105.000.000	
34	Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	Dinas PMDP2A	1 kegiatan	275.000.000	Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	Dinas PMDP2A	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	1 kegiatan	275.000.000	
X	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mampu menciptakan suasana tenram dan damai dalam kehidupan sosial budaya masyarakat	Dinas PMDP2A			Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	Dinas PMDP2A	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mampu menciptakan suasana tenram dan damai dalam kehidupan sosial budaya masyarakat			
35	Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Jumlah desa yang dibina	Dinas PMDP2A	30 Desa/Kel	500.000.000	Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Dinas PMDP2A	Jumlah desa yang dibina	30 Desa/Kel	500.000.000	SIKD
36	Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	Terlaksananya kegiatan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	Dinas PMDP2A	30 Desa/Kel	1.200.000.000	Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	Dinas PMDP2A	Terlaksananya kegiatan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	30 Desa/Kel	1.200.000.000	
XI	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Terbangunnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat melalui penggunaan teknologi tepat guna	Dinas PMDP2A			Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	Dinas PMDP2A	Terbangunnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan pelestarian lingkungan hidup untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kehidupan masyarakat melalui penggunaan teknologi tepat guna			1.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
37	Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan	Dinas PMDP2A	10 kecamatan	150.000.000	Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan	Dinas PMDP2A	Terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan	10 kecamatan	150.000.000	
38	Jombore TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah jenis Teknologi Tepat Guna yang dimasyarakatkan	Dinas PMDP2A	3 jenis	475.000.000	Jombore TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Dinas PMDP2A	Jumlah jenis Teknologi Tepat Guna yang dimasyarakatkan	3 jenis	475.000.000	
XII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan	Dinas PMDP2A			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Dinas PMDP2A	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan			
39	Penyusunan produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	Tersusunnya produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	Dinas PMDP2A	2 dokumen	50.000.000	Penyusunan produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	Dinas PMDP2A	Tersusunnya produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	2 dokumen	50.000.000	
40	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Jumlah fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Dinas PMDP2A	1 kegiatan	100.000.000	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Dinas PMDP2A	Jumlah fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	1 kegiatan	100.000.000	
41	Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan	Terlaksananya Pembekalan dan Pembenahan Forum Anak, Pelaksanaan Jambore Anak dan tahapan perwujudan kota layak anak (KLA)	Dinas PMDP2A	1 kegiatan	80.000.000	Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan	Dinas PMDP2A	Terlaksananya Pembekalan dan Pembenahan Forum Anak, Pelaksanaan Jambore Anak dan tahapan perwujudan kota layak anak (KLA)	1 kegiatan	80.000.000	
42	Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak cacat	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Cacat	Dinas PMDP2A	1 kegiatan	160.000.000	Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak cacat	Dinas PMDP2A	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Cacat	1 kegiatan	160.000.000	
43	Rakor PPRG Penganggaran Yang Resposif Gender	Terselenggaranya PPRG	Dinas PMDP2A	1 kegiatan	55.000.000	Rakor PPRG Penganggaran Yang Resposif Gender	Dinas PMDP2A	Terselenggaranya PPRG	1 kegiatan	55.000.000	
XIII	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Dinas PMDP2A			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Dinas PMDP2A	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan			
44	Perayaan Hari Kartini	Terlaksananya Peringatan Hari	Dinas	1 kegiatan		Perayaan Hari Kartini	Dinas	Terlaksananya Peringatan Hari	1 kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
		Kartini	PMDP2A		75.000.000		PMDP2A	Hari Kartini		75.000.000	
45	Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan bagi Anak	Dinas PMDP2A	500 orang	100.000.000	Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak	Dinas PMDP2A	Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan bagi Anak	500 orang	100.000.000	
46	Pencegahan dan Penanggulangan KDRT	Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan bagi perempuan	Dinas PMDP2A	750 orang	190.000.000	Pencegahan dan Penanggulangan KDRT	Dinas PMDP2A	Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan bagi perempuan	750 orang	190.000.000	

RENJA 2019

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Pada bagian ini dijelaskan bahwa terkait dengan usulan program dan kegiatan masyarakat secara keseluruhan berasal dari usulan dari bawah (bottom up planning) yang kemudian dihimpun untuk dibahas dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan. Disamping itu usulan program/kegiatan tersebut juga melalui tahapan dan mekanisme mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, dan Musrenbang Tingkat Kabupaten setelah melalui pembahasan di Forum SKPD.

Usulan program/kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan diprioritaskan pada program sebagai berikut :

- 1). Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2). Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- 3). Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 4). Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
- 5). Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
- 6). Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- 7). Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- 8). Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 9). Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan

N O	Proram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				
I	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	Penyusunan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang disusun	7 dokumen	
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyusunan Produk Hukum di Desa	153 desa	
3	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah desa yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	153 desa	
4	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak	26 desa	
II	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				
5	Bimbingan teknis Kepala Desa	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah peserta yang dilatih	26 orang	
6	Bimtek Penyusunan Laporan Kepala Desa	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah peserta yang dilatih	153 desa	
7	Lomba Desa terbaik tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan	Terpilihnya juara lomba desa	10 desa	
III	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				

N O	Proram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
8	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang dievaluasi	153 desa	
9	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	153 desa	
10	Implementasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) yang diimplementasikan pada Pemerintah Desa	1 Aplikasi	
IV	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat				
11	Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah BUM Desa yang terbentuk	30 BUMDes	
12	Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengurus badan usaha milik desa	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah peserta yang dilatih	30 orang	
13	Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah unit kerja bersama pengelola dana bergulir spp pada BKAD yang dibina	10 unit (kecamatan)	
V	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				
14	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dilatih	30 orang	
15	Fasilitasi Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kel	Kab. Humbang Hasundutan	Tersedianya data profil desa/kel yang aktual dan terbaru	154 desa/kel	
16	Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	Kab. Humbang Hasundutan	Terlaksananya pembinaan/monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	1 tahun	
17	Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	Kab. Humbang Hasundutan	Terlaksananya Kegiatan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	1 kegiatan	
VI	Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat				
18	Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah desa yang dibina	15 desa/kel	
19	Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	Kab. Humbang Hasundutan	Terlaksananya kegiatan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	15 desa/kel	
VII	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna				
20	Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah posyantekdes yang dibina dan dikembangkan	10 kecamatan	
21	Jombore TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah jenis Teknologi Tepat Guna yang dimasyarakatkan	3 jenis	
VIII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				
22	Penyusunan produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	Kab. Humbang Hasundutan	Tersusunnya produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	2 dokumen	
23	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	1 kegiatan	
24	Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan	Kab. Humbang Hasundutan	Terlaksananya Pembekalan dan Pembenahan Forum Anak, Pelaksanaan Jambore Anak dan tahapan perwujudan kota layak anak (KLA)	1 kegiatan	
25	Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak cacat	Kab. Humbang Hasundutan	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak Cacat	1 kegiatan	
26	Rakor PPRG Penganggaran Yang Responsif Gender	Kab. Humbang Hasundutan	Terselenggaranya PPRG	1 kegiatan	
IX	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan				
27	Perayaan Hari Kartini	Kab. Humbang Hasundutan	Terlaksananya Peringatan Hari Kartini	1 kegiatan	
28	Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan bagi Anak	250 orang	

N O	Proram/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
	terhadap Anak				
29	Pencegahan dan Penanggulangan KDRT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah SDM terlatih tentang Perlindungan bagi perempuan	250 orang	

RENJA 2019

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal RI bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1). Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya Norma, Standar, Kriteria dan Prosedur (NSPK) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, energi dan listrik dan telekomunikasi) serta perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan standarisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan lintas Sektor (Kementerian/Lembaga) masuk ke Desa berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 2). Pengembangan Lumbung Ekonomi Desa, melalui strategi: pembentukan dan pengembangan BUMDesa Sejahtera, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah Desa, pengembangan dan pengelolaan Koperasi Desa, pengembangan dan pengelolaan lembaga simpan pinjam dan keuangan mikro, pengembangan bantuan permodalan usaha ekonomi, pengembangan sentra komoditi, olahan dan industri rumah tangga, pengembangan nilai tambah produksi melalui pendayagunaan teknologi tepat guna, pengembangan inovasi dan hak paten teknologi tepat guna pedesaan, pengembangan kualitas dan mutu produksi Desa, pengembangan Desa Berdaya, pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa serta pengembangan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis pengelolaan potensi sumber daya yang ada.
- 3). Pemetaan potensi sumber daya alam dalam skala kewenangan local desa, pengembangan usaha bersama komunitas berbasis potensi lokal, pengembangan wirausaha dan kapasitas kelompok masyarakat dan Lembaga Masyarakat Desa dalam pengelolaan potensi sumber daya alam secara produktif, fasilitasi pengembangan kemitraan dan CSR ke Desa, fasilitasi penanaman investasi ke Desa, pengembangan perlindungan dan pelayanan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa), serta pembangunan dan pengelolaan infrastruktur dasar (pendidikan dasar, kesehatan dasar, perumahan dan pemukiman, jalan penghubung, air bersih dan sanitasi, irigasi, listrik dan energi, telekomunikasi, pasar, terminal dan dermaga, fasilitas olah raga, taman bermain anak-anak).
- 4). Pengembangan Lingkar Budaya Kerja Desa, melalui strategi: pengembangan etos kerja melalui kelembagaan organisasi komunitas, penguatan kapasitas masyarakat, penguatan peran serta, swadaya dan gotong royong masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan Desa dan Desa membangun, pengembangan pendampingan Desa, mendukung pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda, lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa, menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, keamanan lingkungan

Desa, dan meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa, audit sosial masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan, pengelolaan hasil pembangunan Desa berkelanjutan.

- 5). Pengembangan Akuntabilitas dan Keterpaduan antara Pembangunan Desa dan Desa Membangun berbasis Dana Desa sekaligus upaya mendukung revolusi mental, melalui strategi: pengembangan dan revitalisasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penguatan kapasitas masyarakat Desa dalam penerapan manajemen pembangunan Desa dan Desa Membangun, pengembangan audit social masyarakat Desa secara partisipatif, pengembangan dan fasilitasi paralegal masyarakat Desa berbasis musyawarah dalam penyelesaian masalah dan alternative dispute resolution, fasilitasi swakelola dan pelelangan masyarakat, fasilitasi penyusunan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pembangunan berbasis Dana Desa.
- 6). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan pangan, melalui strategi:
 - a) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - b) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - c) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan;
 - d) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala local termasuk pengelolaan hutan Negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam;
 - f) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola shareholding melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham;
 - g) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
- 7). Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:
 - a) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata;
 - b) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah;
 - c) mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa (melalui pembentukan lembaga BUM Desa Bersama atau kerjasama antar 2 BUM Desa);
 - d) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi;
 - e) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan;
 - f) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.
- 8). Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:
 - a) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
 - b) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
 - c) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;

- d) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalkan pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.
- 9). Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:
- a) melengkapi dan mensosialisasikan peraturan pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b) meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan public melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan;
 - c) menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.

Penyiapan dan peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya masyarakat desa termasuk kelembagaan di tingkat desa agar mampu mengelola, membangun dan mampu menjadi penggerak roda pembangunan di perdesaan, diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah perdesaan. Hal ini didasarkan pada keragaman kapasitas pemerintah desa dan lembaga di tingkat desa untuk memfasilitasi, perencanaan dan memonitor program pembangunan. Oleh karena itu, dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMN 2014-2019, diperlukan beberapa langkah penguatan kelembagaan pengembangan perdesaan sebagai berikut:

- 1). Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan, pelaporan dan akuntabilitas terkait kewenangan dan keuangan desa. Diperlukan program pembelajaran yang komprehensif bagi aparat pemerintahan desa agar dapat mendorong efektifitas dan transparansi di dalam penggunaan sumber daya desa, termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan pembangunan; prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, akuntabilitas dan transparansi); manajemen keuangan dan sistem akunting; serta pengawasan berbasis masyarakat untuk proyek-proyek pemberdayaan masyarakat.
- 2). Penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Diperlukan pengembangan kapasitas BPD sebagai upaya turut meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan musyawarah Desa.
- 3). Penguatan lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
- 4). Penguatan peran Lembaga Ekonomi Desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan lainnya sebagai upaya untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa sebagai salah satu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa, dan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan desa dan memperkuat pemberdayaan masyarakat desa.
- 5). Peningkatan peran fasilitasi, pelatihan dan pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan Desa dalam mendorong pembangunan Desa dan pembangunan Pprdesaan serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial

dan budaya dengan menggunakan kearifan lokal, menghormati adat istiadat dan memperhatikan kondisi sosial budaya yang ada.

- 6). Peningkatan peran fasilitasi, pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan implementasi penataan ruang kawasan perdesaan yang memperhitungkan ekologi ruang perdesaan yang memperhitungkan kearifan lokal, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

b. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

VISI

Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengacu pada Visi Kabinet Kerja 2015–2019 yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta menjadi kerangka kerja yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan yaitu : “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

MISI

Misi Kementerian PPPA mengacu pada Misi Kabinet Kerja yang dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental dalam melaksanakan agenda pemerintahan negara di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Misi ini menjadi acuan utama untuk menggerakkan segala potensi dan sumberdaya serta modalitas lainnya guna mencapai kinerja yang lebih optimal guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Misi Kementerian PPPA Tahun 2015-2019 adalah Misi Pemerintahan Kabinet Kerja:

- 1). Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- 2). Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 3). Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; dan
- 4). Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

TUJUAN

Rumusan Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- 2). Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- 3). Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak;
- 4). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.

Indikator kinerja masing-masing tujuan merupakan Indikator Utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut:

No	TUJUAN
	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan pembangunan yang responsif gender dan perlindungan anak
2.	Jumlah K/L dan Pemda yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak
3.	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak
4.	Jumlah K/L dan Pemda yang menerapkan sistem data gender dan anak

5.	Persentase hasil pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti
6.	Persentase pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemen PP-PA

SASARAN STRATEGIS

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka perlu ditetapkan sasaran dari masing-masing:

Tujuan 1: Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang ditandai dengan:

- 1). Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- 2). Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Tujuan 2: Meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan yang ditandai dengan:

- 1). Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- 2). Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan dan anak;
- 3). Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan komprehensif.

Tujuan 3: Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:

- 1). Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus, yang ditandai dengan:
 - a) Tersedianya kebijakan pemenuhan hak anak;
 - b) Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak.
- 2). Meningkatnya perlindungan anak, yang ditandai dengan:
 - a) Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan anak;
 - b) Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan perlindungan anak;
 - c) Meningkatnya persentase pengaduan kasus anak yang ditindaklanjuti.

Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PPPA.

Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:

- 1). Meningkatnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat yang ditandai dengan:
 - a) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - b) Terlaksananya promosi kebijakan pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak dan perlindungan anak yang didistribusikan dan direspon;
 - c) Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA.
- 2). Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran;
 - a) Terlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b) Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja;
 - c) Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri;

- d) Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
- 3). Meningkatnya pelembagaan data terpilah dan data anak, yang ditandai dengan:
 - a) Meningkatnya jumlah kebijakan penyusunan data terpilah dan data anak;
 - b) Meningkatnya jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan data terpilah dan data anak.
- 4). Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya perencanaan, pembinaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesional dan kompetitif;
- 5). Meningkatnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA, yang ditandai dengan terlaksananya pengawasan keuangan dan kinerja yang akuntabel;
- 6). Meningkatnya telaahan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak, yang ditandai dengan tersedianya hasil telaahan untuk penyempurnaan kinerja pelaksanaan Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mengemban tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menyelenggarakan fungsi :

- (a) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (b) Penyusunan data dan informasi mengenai pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat ekonomi lemah;
- (c) Penyusunan data dan informasi mengenai kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- (d) Penyusunan rencana kebutuhan pembinaan dan pengawasan kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- (e) Penyusunan rencana kebutuhan pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat ekonomi lemah;
- (f) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fisik, sosial, dan ekonomi masyarakat ekonomi

lemah;

- (g) Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan kelembagaan, tata kelola, program kerja, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- (h) Pelaksanaan pembinaan aparatur pemerintahan desa;
- (i) Pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengembangan, koordinasi, kemitraan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan SKPD, instansi pemerintah/swasta dan/atau pihak ketiga lainnya;
- (j) Pembentukan dan pendayagunaan kelompok masyarakat dan desa sebagai rujukan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (k) Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- (l) Pengembangan dan pendayagunaan peran serta masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan masyarakat dan desa;
- (m) Pelaksanaan pendampingan pembentukan dan pengelolaan BUM Desa;
- (n) Pengelolaan prasarana dan sarana pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (o) Pengembangan dan pendayagunaan tenaga kepelatihan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (p) Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa;
- (q) Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan kerjasama antar desa;
- (r) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- (s) Penetapan sistem data gender dan anak;
- (t) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, perlindungan anak, tumbuh kembang anak, dan partisipasi masyarakat;
- (u) Koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis gender;
- (v) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (w) Pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (x) Pelaksanaan administrasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Humbang Hasundutan.
- (y) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, di dalam Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan telah ditetapkan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Perangkat Desa;

2. Seksi Administrasi Keuangan Desa; dan
 3. Seksi Evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Adat, terdiri dari:
1. Seksi Bina Kehidupan Dan Partisipasi Masyarakat;
 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna; dan
 3. Seksi Usaha Ekonomi Desa;
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
 2. Seksi Pengembangan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan Renja SKPD harus menelaah kebijakan dan program prioritas nasional sebagai upaya mensinergikan program pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan diatas maka tujuan dan sasaran yang mengacu pada visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 yaitu :

Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, adalah **“TERWUJUDNYA KEBERDAYAAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF MENUJU KELUARGA SEJAHTERA YANG BERKEADILAN GENDER”** (keberdayaan masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan politik, sehingga secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam proses pembangunan).

Misi

Berdasarkan isu-isu strategis lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lima tahun ke depan dalam upaya mengembangkan kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi 2016-2021, dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Memantapkan sistem pemerintahan desa yang bersih dan berwibawa;
- 2) Memantapkan kelembagaan masyarakat dalam mengembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- 3) Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis;
- 4) Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat;
- 5) Meningkatkan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat;
- 6) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, demokratis, dan saling menghargai tanpa diskriminasi khususnya kepada perempuan dan anak.
- 7) Mewujudkan kehidupan keluarga yang berkualitas dan sejahtera;

Tujuan dan sasaran rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD periode waktu 2016-2021, sebagai berikut :

Tujuan

- 1) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- 2) Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan;
- 3) Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal, serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender;
- 4) Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;
- 5) Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna;
- 6) Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 7) Meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- 8) Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

Sasaran

- 1) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;
- 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa;
- 3) Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;
- 4) Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa;
- 5) Terbangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga sosial ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat;
- 6) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
- 7) Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- 8) Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;
- 9) Meningkatnya pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan, maka rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- i. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah
 - j. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
 - 4) Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Penyusunan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
 - c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak
 - e. Penataan Tapal Batas Desa
 - 5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
 - a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - b. Penyelenggaraan Bimbingan teknis Pemantapan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - c. Bantuan mengikuti diklat/bimtek/workshop/sosialisasi bagi aparatur pemerintah desa
 - d. Bimtek Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - e. Lomba Desa terbaik tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Sumatera Utara
 - f. Pembinaan dan Pelatihan TPK Desa
 - 6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
 - b. Penyusunan pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Implementasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa
 - e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
 - 7) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - a. Pembukaan jalan pendukung ke sentra produksi pertanian dengan pola pemberdayaan masyarakat
 - b. Pembangunan saluran irigasi desa
 - 8) Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - a. Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
 - b. Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengurus badan usaha milik desa
 - c. Pembangunan Pasar Desa/Kawasan Perdesaan
 - d. Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
 - e. Bimbingan teknis pengolahan hasil produksi pertanian di perdesaan
 - f. Bimbingan tekni peningkatan ketrampilan Budidaya Tanaman dengan sisten Hydroponic
 - 9) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
 - a. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lurah
 - b. Fasilitasi Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kelurahan

- c. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
 - d. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)
 - e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Paralegal Desa
 - f. Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun
 - g. Bantuan dana masyarakat siap membangun
 - g. Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK
- 10) Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- a. Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK
 - b. Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan
 - c. Bimbingan Teknis keterampilan tata rias
- 11) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
- a. Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan
 - b. Jombore TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional
 - c. Demplot pengolahan/pemanfaatan hasil bumi
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana internet perdesaan
- 12) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- a. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
 - b. Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan
 - c. Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak cacat
 - d. Rakor PPRG Penganggaran Yang Responsif Gender
- 13) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- a. Perayaan Hari Kartini
 - b. Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak
 - c. Pencegahan dan Penanggulangan KDRT

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar, Rencana Kerja yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 kami sampaikan pada tabel dibawah ini. Untuk pendanaannya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih tergantung pada APBD Kabupaten Humbang Hasundutan karena pada saat ini belum ada dana APBN seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) maupun Tuban (Tugas Perbantuan).

Tabel. 4.1
Rekapitulasi Kegiatan pada Renja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019

Program	Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)	Sumber Dana
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.000.000	APBD
	2 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000	APBD
	3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	75.000.000	APBD
	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000	APBD
	5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.000.000	APBD
	6 Penyediaan makanan dan minuman	122.000.000	APBD
	7 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	300.000.000	APBD
	8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	100.000.000	APBD
	9 Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan dan Perundang -undangan	33.000.000	APBD
	10 Penyediaan Jasa Perbendaharaan dan Pelaporan-Pelaporan Kegiatan	15.000.000	APBD
	11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/ teknis perkantoran	21.600.000	APBD
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	72.000.000	APBD
	13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000	APBD
	14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65.000.000	APBD
	15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	20.000.000	APBD
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	18.000.000	APBD
4 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur	17 Pengiriman ASN mengikuti Diklat, Workshop, Bimtek dan Studi Banding	85.000.000	APBD
5 Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	18 Penyusunan Peraturan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	165.000.000	APBD
	19 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	90.000.000	APBD
	20 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	175.000.000	APBD
	21 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak	750.000.000	APBD
6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	22 Bimbingan teknis Kepala Desa baru terpilih	112.500.000	APBD
	23 Bimtek Penyusunan Laporan Kepala Desa	210.000.000	APBD
	24 Lomba Desa terbaik tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Provinsi Sumatera Utara	155.000.000	APBD
7 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	25 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)	150.000.000	APBD
	26 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	495.000.000	APBD
	27 Implementasi Sistem Informasi keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Desa	150.000.000	APBD
8 Program Pemberdayaan	28 Fasilitasi Pembentukan Badan Usaha Milik Desa	75.000.000	APBD

Usaha Ekonomi Masyarakat		(BUM Desa)		
	29	Bimbingan teknis peningkatan ketrampilan manajemen bagi pengurus badan usaha milik desa	50.000.000	APBD
	30	Pembinaan dan Pengendalian Dana Bergulir Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)	200.000.000	APBD
9 Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	31	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	50.000.000	APBD
	32	Fasilitasi Penyusunan dan Pemutakhiran Data Profil Desa/Kel	200.000.000	APBD
	33	Pembinaan/Monitoring Gotong Royong dan Masyarakat Siap Membangun	105.000.000	APBD
	34	Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK	275.000.000	APBD
10 Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	35	Sosialisasi/Pembinaan 10 Program Pokok PKK	500.000.000	APBD
	36	Pelaksanaan Gerakan PKK Tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan	1.200.000.000	APBD
11 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	37	Pembinaan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) di Kecamatan	150.000.000	APBD
	38	Jombore TTG tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional	475.000.000	APBD
12 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	39	Penyusunan produk hukum daerah tentang perlindungan perempuan dan anak	50.000.000	APBD
	40	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	100.000.000	APBD
	41	Pembentukan dan Penguatan Forum Anak di Kabupaten Humbang Hasundutan	80.000.000	APBD
	42	Peringatan Hari Ibu dan Peningkatan Kesejahteraan Anak cacat	160.000.000	APBD
	43	Rakor PPRG Penganggaran Yang Responsif Gender	55.000.000	APBD
13 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	44	Perayaan Hari Kartini	75.000.000	APBD
	45	Pembinaan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak	100.000.000	APBD
	46	Pencegahan dan Penanggulangan KDRT	190.000.000	APBD
			12.286.100.000	APBD

BAB V PENUTUP

Ketersediaan anggaran yang memadai akan dapat mendukung pencapaian target kinerja semua program dan kegiatan yang di inginkan dengan baik demikian, sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2019.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Doloksanggul Oktober 2018

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,
DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**

**Drs. VANDEIK SIMANUNGKALIT,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650120 199503 1 001**